

TEORI SOSIALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Wahyu Hidayat¹⁾, Ari Ramadhana²⁾, Andri
Suryana³⁾

UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾, UIN Sunan Gunung Djati Bandung²⁾, UIN
Sunan Gunung Djati Bandung³⁾

Wahyuhidayat@uinsgd.ac.id¹⁾, ardhanramadhana58@gmail.com²⁾,
andrisuryanaofficial@gmail.com³⁾

Abstract

Socialization is the most important process that we consciously or unconsciously live in our daily lives. Education policy is very important related to the morals of students. Aims to find out how to socialize education policy; knowing the stages of education policy socialization of education policy. This research was carried out with a qualitative descriptive approach seen from the point of view of education policy socialization, an approach that was in accordance with the circumstances found. The results of this study indicate that; there are several stages that need to be considered in the educational policy socialization process, namely: 1) the preparation stage (play stage), and 2) the action stage (game stage). Education policies that have been formulated can be disseminated using various media, both in the form of communication media such as posters, brochures, banners, and billboards, as well as through electronic media, such as optical discs (compact disks or DVD), sosial media, internet, radio and television.

Keyword: Socialization, policy, education

Article Info

Received date: 25-02-2023

Revised date: 10-03-2023

Accepted date: 30-04-2023

Pendahuluan

Lembaga pendidikan merupakan sarana utama pendidikan yang menjadi elemen penting yang berperan dalam mewujudkan cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Menimbang cita-cita luhur tersebut tentu diperlukan suatu program, salah satu program ini tentu diturunkan melalui sebuah kebijakan yang dibuat. Dalam menyusun sebuah kebijakan tentu tak terlepas sedari tahapan perancangan hingga implementasinya, akan tetapi hal yang tak kalah penting ialah bagaimana kebijakan tersebut bisa disosialisasikan dengan cara yang tepat sehingga kebijakan yang telah di rancang sedemikian rupa dapat diterima dan diimplementasikan sebagaimana maksud dari kebijakan tersebut.

Adanya dinamika kebijakan yang bersifat dinamis mengakibatkan fluktuasi informasi yang silih berganti. Apalagi jika kebijakan tersebut keluar dari pemerintah pusat ataupun wilayah yang harus diteruskan ke daerah daerah ataupun distrik yang tentu diperlukan sistem informasi kebijakan pendidikan yang tepat. Adanya hal tersebut menimbulkan beberapa problematika dalam sistem sosialisasi kebijakan.

Tentu hal tersebut menjadi tantangan bagi setiap lembaga pendidikan dalam melaksanakan proses sosialisasi kebijakan pendidikan untuk bisa mengimplementasikan sebuah kebijakan secara tepat dan menyeluruh. Dewasa ini banyak sekali kendala yang bisa menjadi hambatan dalam pengoptimalan sosialisasi kebijakan pendidikan, misalnya kurangnya media komunikasi yang mendukung proses sosialisasi kebijakan tersebut, dibutuhkannya daya dukung yang mumpuni dalam sistem sosialisasi baik sarana dan prasarana ataupun sumber daya manusia, serta adanya ketidak tepatan waktu dalam penyebaran informasi yang diberikan sehingga ada gap waktu yang cukup signifikan yang membedakan kualitas implementasi akan kebijakan pendidikan yang diberikan.

Sosialisasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti cara belajar seorang individu untuk lebih memahami kebudayaan dalam suatu lingkungan. Kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya seperangkat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi dengan demikian kebijakan mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Pendidikan adalah perkara primer bagi setiap orang, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal (1) Ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan satu kesatuan dari proses sosialisasi, kebijakan dan pendidikan yang memiliki keterkaitan dan keberlangsungannya bergantung pada individu khususnya sebagai pemangku kebijakan untuk menyosialisasikan suatu kebijakan yang telah di rancang dan dibuat. Maka berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu pemahaman yang mendalam akan sebuah sistem sosialisasi kebijakan pendidikan dengan tepat.

Pembahasan

A. Pengertian Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebuah proses yang paling penting yang secara sadar atau tidak kita sudah jalani dalam kesehariannya. Sosialisasi juga menjadi suatu kegiatan di mana seorang diberikan pelajaran menjadi manusia yang berkontribusi dalam masyarakat maupun organisasi atau tempat kerjanya. Biasanya berbagai permasalahan

seputar sosialisasi kebijakan, belum di ketahuinya aturan, prosedur, tanggung jawab, batasan, koordinasi, tindakan yang tepat belum diketahui masyarakat. Untuk mengatasi agar tidak terjadi miskomunikasi, kesalahan interpretasi, pada hakikatnya sosialisasi kebijakan ini harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan¹.

Kegiatan sosialisasi sangat penting dilaksanakan, sebab luasnya wilayah kerja organisasi, termasuk sulitnya akses komunikasi ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh berbagai media informasi baik elektronik maupun cetak, disamping kecenderungan manusia untuk menerima suatu konsep perubahan tidak gampang. Banyak perubahan baik organisasional maupun personal memerlukan keterampilan dan pengetahuan baru agar dapat menyesuaikan dengan lebih baik dalam lingkungan yang baru. Dalam mengefektifkan pencapaian tujuan perubahan, maka diperlukan kejelasan tujuan dan cara yang tepat baik menyangkut aspek proses maupun pengembangan, mencakup: manusia, tujuan, kebiasaan, proses, hasil dan lingkungan eksternal².

2. Kebijakan Pendidikan

Secara instrumental amanat Pembukaan UUD 45 dijabarkan ke dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menggariskan bahwa pendidikan merupakan hak dari tiap-tiap. warga negara. Implikasinya adalah pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur melalui undang-undang. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan antara Pemerintah dengan Warga Negara secara eksplisit tergambar melalui pasal 31 UUD 45.

Kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-

hati yang intinya seperangkat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi dengan demikian kebijakan mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Oleh karena itu kebijakan secara praktis dapat di fahami sebagai keputusan pemerintah, *as decision of government* sebagai bentuk pengesahan *formal as formal authorization*, sebagai *program as programme*, sebagai keluaran *as output*, sebagai hasil akhir *as outcome* dan sebagai teori atau *model as a theory or model* serta sebagai *proses as process*³.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memeberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada para manajer untuk bergerak. Kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen⁴.

Menurut Lasswell sebagaimana dikutip oleh Ino Sutisno Rawita, kebijakan didefinisikan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Selanjutnya, Eulao sebagaimana dikutip Jones kemudian dikutip oleh Ino Sutisno Rawita mendefinisikan kebijakan sebagai cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah, sebagai keputusan yang tetap, dicirikan oleh tindakan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang menyusun dan melaksanakan kebijakan⁵.

Kebijakan pendidikan adalah konsep atau gagasan yang sering kita dengar, kita ucapkan bahkan kita lakukan, tetapi seringkali tidak dipahami secara baik. Landasan utama yang mendasari suatu

¹ Moh Zidna Faojan Adima, "Sosialisasi Kebijakan Pendidikan", Muntazam: Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol. 2 (No.2). (2021) : 43

² Arwildayanto, dkk. "Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif". Bandung: Cendekia Press. 2018: 120

³ Suhelayanti. Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 2020: 13.

⁴ Hamidah. *Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik*. Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan, 9(1), 2020: 35

⁵ Umar Sidiq. (2019). *Kebijakan Pemenrintah: Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. Naya Karya. 2019: 2

kebijakan adalah pertimbangan akal sehat dan juga berdasarkan kebutuhan di lapangan. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia entah itu perseorangan maupun kelompok, walaupun akal manusia merupakan unsur yang dominan dalam mengambil keputusan. Suatu kebijakan kadang kala lebih menekankan kepada faktor-faktor emosional dan irasional. Hal ini bukanlah berarti bahwa suatu kebijakan tidak mengandung unsur-unsur rasional. Bisa saja terjadi bahwa faktor-faktor rasional tersebut belum tercapai pada saat itu atau baru saja merupakan intuisi belaka⁶.

Kebijakan pendidikan menjadi sangat penting terkait dengan moral anak didik. Kebijakan pendidikan mencakup seperangkat ketetapan, peraturan mengenai pendidikan yang dirumuskan berdasarkan permasalahan dengan latar belakang masyarakat yang diawali dengan perumusan, penetapan, implementasi hingga pada evaluasi. Wujud dari kebijakan pendidikan ini biasanya berupa Undang-Undang pendidikan, intruksi, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya menyangkut Pendidikan⁷.

Kebijakan pendidikan menurut Carte V. Good (1959) menyatakan, *Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assessment of situational factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives*. Pengertian pernyataan di atas adalah, bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil

keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Hough (1984) sebagaimana dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012) juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan⁸.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan sangat menentukan arah serta jalur dalam proses pendidikan itu sendiri. Karena sekali langkah dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pendidikan yang akan diambil, maka hal ini akan sangat berpengaruh pada kualitas mutu pendidikan dari tingkat satuan sampai nasional. Agar dampak negatif dapat dikurangi maka dapat diperlukan suatu efektivitas dan efisiensi dalam proses kebijakan pendidikan dengan memahami secara mendalam hakikat kebijakan pendidikan itu sendiri⁹. Dalam proses analisis kebijakan terdapat proses yang harus dilaksanakan oleh pembuat kebijakan. Proses ini bertujuan agar kebijakan yang dilahirkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi¹⁰.

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus yakni:

- 1) Memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
- 2) Memenuhi aspek legal-formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus

⁶ Angelika Bule Tawa. Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar. E-Journal.Stp-Ipi.Ac.Id, 2019: 107

⁷ Moh Zidna Faojan Adima, "Sosialisasi Kebijakan Pendidikan", Muntazam: Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol. 2 (No.2). (2021) : 43

⁸ Angelika Bule Tawa. Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar. E-Journal.Stp-Ipi.Ac.Id, 2019: 110

⁹ Srihartini, dkk. (2021). *Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Kabupaten Bogor*. Religion Education Social Laa Roiba Journal, 3(2), 2021: 253

¹⁰ Linda Sari Oktavia, dkk. Kebijakan Pendidikan: Kerangka, Proses dan Strategi. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 6(1), 2021: 97

dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

- 3) Memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.
- 4) Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
- 5) Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki atau dievaluasi.
- 6) Memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat

pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya¹¹.

Ketika kebijakan tidak dijalankan secara baik, maka akan timbul kesenjangan implementasi (*implementation gap*) yang diartikan sebagai “perbedaan antara hukum yang tertulis dengan prakteknya di lapangan”. Biasanya *implementation gap* ini terlihat dan sering dirasakan pada level bawah Penyebab adanya *implementation gap* dapat berasal dari faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk mengatasi *implementation gap* dibutuhkan pendekatan yang berfokus pada kualitas kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan sasaran (masyarakat). Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi *implementation gap* ini¹².

Dalam Heriawan (2018) kebijakan pendidikan memiliki kriteria sebagai berikut:¹³

- 1) Kebijakan pendidikan memiliki tujuan yang jelas dan terarah guna memberikan kontribusi pada dunia pendidikan.
- 2) Memenuhi aspek legal formal, yaitu kebijakan pendidikan akan diberlakukan harus sah dan berlaku disuatu wilayah. Kebijakan pendidikan yang dikeluarkan secara hirarkhi dan legitimat dalam hal ini tidak bertentangan kebijakan pendidikan yang lebih atas
- 3) Dibuat stakeholder yang berwenang, yaitu kebijakan pendidikan yang dibuat oleh para stakeholder mencakup

¹¹ Angelika Bule Tawa.” Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar”. E-Journal.Stp-Ipi.Ac.Id, 2019: 112

¹² Sasadara wahyu Lukitasari. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol. 4(2), 2017: 122.

¹³ Iwan Heriawan.”Kebijakan Pendidikan Provinsi (SLTA dan SMK) dan Analisis SWOT di Kalimantan Timur”. Jurnal Pendas Mahakam, Vol. 3(2), 2018: 102

administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan politis sesuai ahli dibidangnya dan memiliki kewenangan.

- 4) Memiliki konsep operasional, yaitu kebijakan pendidikan sebagai panduan, mengikat umum, dan operasional kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan sehingga memperjelas pencapaian tujuan pendidikan.
- 5) Memiliki sistematika, yaitu kebijakan pendidikan seyogianya memiliki sistematika yang transparan, efektif, dan akuntabel yang tinggi sehingga kebijakan pendidikan tidak bersifat diskrimatif dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, politik, ekonomi, dan social
- 6) Evaluasi, yaitu kebijakan pendidikan untuk diimplementasikan dan mengetahui sejauhmana efektif substansi kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan jikalau ada kekurangan maka perlu dilengkapi dan direvisi dan masyarakat ikut serta bertanggung jawab dalam proses kebijakan pendidikan.
- 7) Sosialisasi, yaitu kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita acara dan perlu disosialisasikan kepada publik sehingga publik mengetahui dengan transparan.

Dalam proses perumusan kebijakan pendidikan perlu adanya kehati-hatian lebih dari para pembuat kebijakan ketika akan melakukan formulasi kebijakan. Sebab seringkali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa formulasi kebijakan yang baik itu adalah sebuah uraian konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi. Padahal sesungguhnya formulasi kebijakan yang baik itu adalah sebuah uraian atas kematangan pembacaan realitas sekaligus alternatif solusi yang fisibel terhadap realitas tersebut. Kendati pada akhirnya uraian yang dihasilkan itu tidak sepenuhnya presisi dengan nilai ideal normatif, itu bukanlah masalah asalkan uraian atas

kebijakan itu presisi dengan realitas masalah kebijakan yang ada di lapangan¹⁴.

3. Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

Sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi suatu sikap dan tindakan yang diambil oleh aktor atau dengan kemufakatan group pembuat kebijakan sebagai upaya dalam menyelesaikan satu persoalan atau suatu masalah dalam bidang pendidikan.

Sosialisasi kebijakan pendidikan menjadi sebuah mekanisme penyampaian informasi kebijakan pendidikan kepada publik. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Sedangkan kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.

B. Tujuan Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

Tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan pada umum adalah mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan makna dari tujuan dan konsep dari keputusan pemerintah, masyarakat umum mengetahui dan memahami perkembangan implementasi kebijakan dan progam pemerintah sebagai bagian dari pertanggungjawaban terhadap masyarakat, menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat yang terdapat dalam siklus progam dari kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan secara khusus adalah agar terdapatnya kerjasama dan komitmen antara pemerintah dengan masyarakat, atau antara masyarakat dengan masyarakat untuk membua terencana, menjalankan rencana dan memonitor-mensupervisi secara bersama, dapat membangkitkan motivasi kelompok

¹⁴ Baharuddin. "Implementasi Kebijakan Pendidikan" Inklusif Di SDN No. 39 Cakke. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 4 (2), 2020: 192

strategis dan kelompok peduli untuk melakukan tindakan baik dalam kerjasama maupun membangun pengawasan terhadap tujuan kebijakan pendidikan, dan menyebarkan hasil-hasil perkembangan program kebijakan di bidang pembangunan pendidikan kepada masyarakat luas¹⁵.

Seringkali kelemahan dalam sosialisasi produk kebijakan pendidikan belum disosialisasikan pada saat pra legislasi, tiba-tiba menjadi regulasi, keagetan setelah diterapkan karena juga belum disosialisasikan. Fakta dan realitas tentang itu sudah sering kita dapatkan sehingga produk kebijakan seringkali mendapatkan penolakan dari masyarakat atau stakeholder terkait. Untuk itu, para pemangku kepentingan sebaiknya memulai pada saat draf produk kebijakan pendidikan mau digulirkan, termasuk konten dan struktur yang ada dalam aturannya, perilaku yang diharapkan sudah mulai disosialisasikan agar mendapatkan masukan untuk disempurnakan menjadi sebuah kebijakan yang bisa diterima semua pihak¹⁶.

C. Tahapan Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

Sosialisasi kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting, ada beberapa tahapan-tahapan yang diperlukan diperhatikan dalam proses sosialisasi kebijakan tersebut ke masyarakat (*public*) termasuk di bidang pendidikan, yaitu: 1) tahap persiapan (*preparatory stage*), tahap meniru (*play stage*), dan 3) tahap tindakan (*game stage*) (George Herbert Mead, 1962) dalam Arwildayanto, dkk (2018)¹⁷. Dari tahapan-tahapan sosialisasi kebijakan publik ini, kita bisa mengukur suatu keberhasilan suatu sosialisasi kebijakan, dilihat dari indikator

pencapaian masing-masing tahapan sebagai berikut:

1) Tahapan Persiapan (*Preparatory Stage*)

Tahap ini dipersiapkan sejak rencana kebijakan pendidikan digulirkan, seorang pimpinan mempersiapkan draft aturan, regulasi maupun produk kebijakan yang akan dihasilkan. Pada tahap ini juga stakeholder sudah mulai mencerna dan memahami kenapa, manfaatnya dan dampaknya sudah ada dalam pikirannya meski belum sempurna. Dalam tahap ini, setiap individu sebagai anggota masyarakat mempersiapkan diri dengan kebijakan yang akan ditetapkan, serta memahami dan membekali dengan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman dalam kebijakan tersebut, sehingga proses penerimaan produk kebijakan bisa dengan mulus karena sudah berkesesuaian dengan nilai dan norma yang ada dalam lingkungan tersebut.

2) Tahap Meniru (*Play Stage*)

Tahap meniru dicirikan dengan semakin membaiknya masyarakat mengikut kebijakan yang akan ditetapkan, termasuk menyesuaikan peran-peran yang akan dilaksanakan oleh orang dewasa. Pada tahap meniru ini mulai terbentuk kesadaran mengenai kebijakan baru. Masyarakat mulai menyadari tentang apa yang dilakukan oleh seorang pimpinan dan apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut, atau masyarakat memiliki kemampuan untuk memposisikan diri pada kebijakan yang akan disahkan serta mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran kolektif dari masyarakat mulai terbentuk sempurna sesuai dengan harapan dalam kebijakan.

3) Tahap Siap Bertindak (*Game Stage*)

Tahapan *adaptation* yang dilaksanakan tidak menjadi utama lagi mulai berkurang, dan digantikan peran yang secara langsung dimainkan sendiri

¹⁵ Dian Namora, dkk. "Perbincangan Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Islam". Al Hikmah: Journal of Education, 2(1), 2021: 103

¹⁶ Arwildayanto, dkk. "Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif". Bandung: Cendekia Press. 2018: 123

¹⁷ Arwildayanto, dkk. "Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif". Bandung: Cendekia Press. 2018: 123

menjadi kepribadian dan budaya dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi yang diharapkan mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan adanya kemampuan beraktivitas secara bersama-sama dengan sempurna. Pada tahap ini masing-masing orang merasa puas, mereka saling memberi tahu koleganya, dan mulai memahami secara bertahap peraturan-peraturan yang berlaku. Pada kesempatan yang sama masyarakat mulai memahami bahwa ada aturan atau norma tertentu yang berlaku di lingkungannya (*awardness*)¹⁸.

D. Strategi Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

Ada beberapa strategi dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan pendidikan, sesuai dengan situasi dan kondisi unit kerja dan lingkungan masyarakat yang akan diberikan informasi sebagai berikut:



- a) Mendapatkan dukungan dari pimpinan tempat sosialisasi berlangsung, misalnya Mendikbud mensosialisasikan per aturan atau kebijakan pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2018, semua pimpinan sudah memiliki satu semangat untuk merealisasikan kebijakan tersebut, mulai dari Menteri sampai pimpinan dibawahnya.
- b) Memberikan pemahaman kepada pejabat dan staf di lingkungan sosialisasi mengenai kebijakan,

menjelaskan serta arti penting kebijakan pendidikan dalam mendorong efisiensi, efektifitas, peningkatan citra dan akuntabilitas kelembagaan.

- c) Menjelaskan kepada para aktor dan pegawai melalui seminar workshop, atau bimbingan teknis
- d) Menyediakan berbagai media sosialisasi, seperti buku, poster, brosur, leaflet, CD, dan sebagainya, serta menyebarkan informasi tersebut media ke pihak-pihak yang akan melakukan sosialisasi
- e) Membuat poster dan menempatkan pada papan-papan pengumuman dan menyediakan leaflet atau brosur pada tempat-tempat layanan terkait kebijakan yang ditetapkan
- f) Menayangkan pada situs internet lembaga yang menetapkan kebijakan
- g) Menjadikan kebijakan sebagai salah satu tolok ukur bagi unit kerja lain dalam melakukan pengawasan, dan pembinaan serta menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan

Menjadikan penerapan kebijakan sebagai salah satu tolok ukur bagi pimpinan langsung dalam menilai kinerja bawahan¹⁹. Penerapan strategi sosialisasi kebijakan pendidikan tentu diperlukan komunikasi yang baik dalam penyampaian. Komunikasi (*Communication*), merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

Menurut pandangan Edwards (1980) informasi kebijakan pendidikan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar

¹⁸ Arwildayanto, dkk. "Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif". Bandung: Cendekia Press. 2018: 126

¹⁹ Arwildayanto, dkk. "Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif". Bandung: Cendekia Press. 2018: 126

tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan secara jelas dan konsisten. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran²⁰.

E. Forum Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Forum

Forum merupakan tempat atau wadah untuk membicarakan kepentingan bersama atau tempat pertemuan dan bertukar fikiran antar pengguna. Forum ini merupakan tempat pengguna untuk mencari informasi yang relevan dan memberikan masukan-masukan sesama antar pengguna. Forum mempunyai aturan-aturan di dalamnya agar pengguna bisa berbicara dengan sopan tanpa menyakiti hati pengguna lainnya, forum juga mempunyai administrator atau bisa juga disebut dengan moderator.

Forum merupakan kelompok orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, dan keanggotaanya memiliki usaha sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin di capai bersama yaitu ingin meningkatkan pendapatan dan lebih mandiri dalam finansial²¹.

2. Tujuan Forum

Forum juga mempunyai tujuan tertentu untuk penggunaanya adapun tujuan forum yaitu sebagai berikut:

- 1) Memudahkan komunikasi antar pengguna.
 - 2) Memudahkan pengguna membentuk jaringan.
 - 3) Memudahkan pengguna mendapatkan informasi.
 - 4) Saling mengisi dengan support dan tanya jawab antar pengguna.
 - 5) Pengguna dapat membantu untuk sukses bersama.
 - 6) Forum akan selalu update sesuai dengan perkembangannya.
- #### **3. Sosialisasi**

Salah satu bentuk sosialisasi ialah dengan melakukan komunikasi untuk memudahkan mereka berbagi informasi satu sama lain dengan pengguna. Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut.

Komunikasi kelompok adalah sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana penggunapenggunaanya dapat mengingat karakteristik pribadi pengguna-pengguna yang lain secara tepat.

4. Forum Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

Berdasarkan penjabaran diatas tentu dapat kita lihat bahwa keberadaan forum dan bentuk komunikasi dalam sebuah sistem sosialisasi kebijakan. Hal tersebut dikarenakan adanya proses dinamika kebijakan dalam sistem pendidikan mengharuskan adanya sebuah forum khusus yang kredibel dan dapat dipercaya untuk mengampu kewenangan menyosialisasikan sebuah kebijakan untuk bisa sampai pada tiap lembaga pendidikan untuk kemudian bisa diimplementasikan.

F. Media Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

Media massa adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk

²⁰ Rahmawati, dkk. "Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kediri". Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan. Volume e, Nomor 1. 2019: 58

²¹ Siti Maemunah, dkk. "Sosialisasi Hasil Riset Yang Didesiminikasikan Ke Forum Kewirausahaan Pemuda Sumatera Utara". Jurnal abdimas Mutiara. Volume 2, Nomor 2. 2021: 127

menyampaikan pesan. Media massa menjadi penting karena memang memiliki kekuatan. Bukan sekedar mampu menyampaikan pesan kepada khalayak tetapi lebih karena media menjalankan fungsi mendidik, mempengaruhi, menginformasikan dan menghibur. Adapun dalam UU no. 40/1999 disebutkan fungsi pers adalah pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan media kontrol sosial. Kontrol sosial itu bisa berupa keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan pertanggungjawaban pemerintah pada rakyat. Media massa mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan masyarakat yang konsumtif akan suatu informasi yang dapat menunjang kehidupan mereka. Isi media dipengaruhi oleh rutinitas isi media. Pendekatan ini menyatakan bahwa isi media dipengaruhi oleh bagaimana para pekerja media dan perusahaan mengorganisasikan diri mereka²²,

Peran media massa sangat menentukan dalam penyampaian informasi maupun suatu kebijakan pemerintah. Sejalan dengan tingkat perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat, maka metode komunikasi pun mengalami perkembangan yang pesat pula. Namun semua itu, mempunyai aksentuasi sama yakni komunikator menyampaikan pesan, ide dan gagasan, kepada masyarakat²³.

Kebijakan pendidikan yang sudah dirumuskan dapat disosialisasikan menggunakan media massa baik melalui radio ataupun melalui media cetak surat kabar²⁴, baik berupa media komunikasi seperti poster, leaflet brosur, spanduk, dan

baliho, maupun melalui media elektronik, seperti cakram optik (*compact disk* atau DVD), internet, radio dan televisi.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Sosialisasi Kebijakan Pendidikan pada bab sebelumnya dapat kita lihat bahwa sebuah sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam mendukung implementasi sebuah kebijakan. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam mengetahui apakah itu sosialisasi kebijakan pendidikan, apa tujuannya itu sosialisasi kebijakan pendidikan, bagaimana tahapan itu sosialisasi kebijakan pendidikan, strategi itu sosialisasi kebijakan pendidikan, serta apa sajakah media yang bisa digunakan dalam itu sosialisasi kebijakan pendidikan yang terjabar dalam poin-poin simpulan dibawah:

1. Sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi suatu sikap dan tindakan yang diambil oleh aktor atau dengan kemufakatan group pembuat kebijakan sebagai upaya dalam menyelesaikan satu persoalan atau suatu masalah dalam bidang pendidikan (Arwildayanto et al., 2018: 122).
2. Sosialisasi Kebijakan Pendidikan memiliki tujuan untuk mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan sebuah kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah ataupun pemangku kebijakan lainnya. Dengan demikian masyarakat umum bisa mengetahui dan memahami perkembangan implementasi kebijakan dan program pemerintah sebagai bagian dari pertanggungjawaban terhadap kebijakan yang diturunkan menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat yang terdapat dalam siklus program dari kebijaksanaan pemerintah.
3. Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam proses sosialisasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat (*public*) termasuk di bidang pendidikan, meliputi: 1) tahap persiapan (*preparatory stage*), tahap

²² Toni. "Peran Film Sebagai Media Sosialisasi Lingkungan". Jurnal Komunikator. Volume 7. Nomer 1. 2015: 43

²³ Makhshun, dkk. "Pengaruh Media Massa Dalam Kebijakan Pendidikan". TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam. Volume 1. Nomer 1. 2018:57

²⁴ Mulyana, dkk. "Efektivitas Penggunaan Media dalam Sosialisasi kebijakan Penanganan Human Trafficking di Kabupaten Indramayu. Jurnal: Prosiding Seminar Nasional Komunikasi. 2016: 130

- meniru (*play stage*), dan 3) tahap tindakan (*game stage*) (George Herbert Mead, 1962) dalam.
4. Strategi sosialisasi kebijakan pendidikan terkait dengan sistem komunikasi yang baik dalam penyampaian. Komunikasi (*Communication*), merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Adapun Strategi dalam rangka terbentuknya komunikasi ataupun sosialisasi kebijakan antara lain dengan mendapatkan dukungan dari pimpinan tempat sosialisasi berlangsung, Memberikan pemahaman kepada pejabat dan staf di lingkungan sosialisasi, Menyediakan berbagai media sosialisasi, memanfaatkan berbagai lini masa (*media*), dan menjadikan kebijakan sebagai salah satu tolok ukur bagi unit kerja lain dalam melakukan pengawasan, dan pembinaan serta menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan.
 5. Forum Sosialisasi Kebijakan merupakan kelompok orang yang menyatukan diri dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan kepentingan dan kebutuhan yang sama, dan memiliki usaha untuk menyosialisasikan suatu kebijakan yang telah dibentul sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai.
 6. Media sosialisasi kebijakan pendidikan yang dapat menunjang keberhasilan pada sosialisai tersebut meliputi berbagai alat komunikasi baik yang bersifat visual, audio, luring ataupun daring (*online*) seperti media massa baik melalui radio ataupun melalui media cetak surat kabar, baik berupa media komunikasi seperti poster, leaflet brosur, spanduk, dan baliho, maupun melalui media elektronik, seperti cakram optik (*compact disk* atau DVD), internet, radio dan televisi.
- Amalia Prajna. (2018). Pengembangan Media Poster Pada Pembelajaran IPA Materi Ciri-Ciri Lingkungan Sehat dan Lingkungan Tidak Sehat Siswa Kelas III SDN Lirboyo 2 Tahun Pelajaran 2017/2018. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 6–7.
- Arwildayanto, Arifin, S., & Warni, S. T. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif. In *Kebijakan Publik*. (Vol. 53, Issue 9, pp. 1689–1699). Cendekia Press.
- Baharuddin, & Saidang. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di SDN No. 39 Cakke. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 4(2), 189–204.
- Dewi, W. N., Sevtiana, A., Suwandi, S., & Julaeha, T. S. (2022). Perancangan Brand Identity Dan Banner Sebagai Media Promosi Bunabee Fashion Untuk Meningkatkan Brand Awareness. *Jurnal Digit*, 12(1), 54.
- Hamidah. (2020). Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34–44.
- Harsismanto, Oktavidiati, E., & Astuti, D. (2019). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Media Video dan Poster terhadap Pengetahuan dan Sikap Anak dalam Pencegahan Penyakit Diare. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 1(1), 75–85.
- Haryadi, T., & Saputro, G. E. (2018). Tinjauan Desain Iklan Dalam Sudut Pandang Majas Visual. *Universitas Dian Nudwantoro*, 97–115.
- Heriawan, I. (2018). Kebijakan Pendidikan Provinsi (SLTA dan SMK) dan Analisis SWOT di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendas Mahakam*, 3(2).
- Maemunah, S. (2021) dkk. Sosialisasi Hasil Riset Yang Didesiminikasikan Ke Forum Kewirausahaan Pemuda Sumatera Utara. *Jurnal abdimas Mutiara*. Volume 2, Nomor 2. Hal 126-131
- Makhshun, T., & Khalilurrahman, K. (2018). Pengaruh Media Massa Dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Adima, M. Z. F. (2021). Sosialisasi Kebijakan Pendidikan. *Muntazam: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(2), 43–46.

- Kebijakan Pendidikan. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 57.
- Melinda, S. (2017). Efektivitas Billboard dan Signboard sebagai Media Promosi Suroboyo Carnival Park Pendahuluan. *Jurnal E-Komunikasi*, 5(1), 1–12.
- Mulyana, S., & Octavianti, M. (2016). Efektivitas Penggunaan Media dalam Sosialisasi Kebijakan penanganan Human Traficcking di Kabupaten Indramayu. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi*, 107–114.
- Muttaqien, M. K., & Anasani, H. A. (2020). Pelatihan Membuat Infused Water Melalui Video Tutorial, Banner dan Poster Sebagai Peluang Usaha dan Proteksi Diri Saat Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1–12.
- Namora, D., & Bakar, A. (2021). Perbincangan Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Journal of Education*, 2(1), 101–114. <https://doi.org/10.54168/ahje.v2i1.36>
- Oktavia, L. S., Nurhidayati, N., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Pendidikan: Kerangka, Proses dan Strategi. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 95.
- Rahmawati, A., & Muflihatin. (2019). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) Zonasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kediri. *Dinamika Manajemen Pendidikan*, 3(1), 56–61.
- Roihanah, dkk. (2022). *Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan*. Jurnal Education and development. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.10. No.3 Edisi September 2022, 94-99
- Saputra, A. L. G. (2022). URGENSI ADMINISTRASI PENDIDIKAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN. JOURNAL J-MPI : JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN KAJIAN KEISLAMAN, 1(2), 15–21. Retrieved from <https://www.ejournal.stitmuhngawi.ac.id/index.php/J-MPI/article/view/53>
- Sidiq, U., & Wiwin Widyawati. (2019). *Kebijakan Pemenintah: Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. Naya Karya.
- Srihartini, Y., Wasliman, I., Iriantara, Y., & Sauri, R. S. (2021). Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Kabupaten Bogor. *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(2), 236–250.
- Suhelayanti. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11–26.
- Suheman, Farhan., dkk (2022). Pengelolaan Aktivitas Media Sosial Instagram @ditjen.dikti oleh Humas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi dalam Sosialisasi Kebijakan Kampus Merdeka. *Journal Of Media and Communication Science*. Vol. 5, No.2, 2022, hlm. 108 - 125
- Sutarini, I. A. (2019). Pengukuran Efektivitas Penggunaan Media Baliho Pada Pemilihan Umum 2019 Terhadap Generasi Milenial. *SENADA (Seminar Nasional Desain Dan Arsitektur)*, 2, 237–241.
- Tawa, A. B. (2019). Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekola Dasar. *E-Journal.Stp-Ipi.Ac.Id*, 107–117.
- Toni, A. (2015). Peran Film Sebagai Media Sosialisasi Lingkungan. *Jurnal Komunikator*, Vol. 7(1), 41–51.
- Wahyu, S., Suteng, B., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121–134.